

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LAKIP)**



**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS**

**TAHUN 2017**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 ini dapat diselesaikan dengan baik.

AKIP ini disusun sebagai bentuk implementasi Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP ini sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 dan analisisnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan LAKIP ini, namun kami berharap dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Selanjutnya, diharapkan kritik dan saran dari pembaca serta stakeholder yang bersifat konstruktif, demi kesempurnaan penyusunan LAKIP dimasa mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan LAKIP ini, semoga Allah SWT meridhoinya. Aamiin.

Bengkalis, Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H. Bustami', written over a horizontal line.

**H. BUSTAMI. HY, SH, MM**

PEMBINA TK.I

NIP. 19640907 198603 1 009

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	1
2. Maksud dan Tujuan LAKIP .....	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
4. Struktur Organisasi .....	3
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>5</b>
1. Kerangka Pengukuran Kinerja .....	5
2. Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 .....	6
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .....	8
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>9</b>
1. Pengukuran Kinerja .....	9
2. Analisis Kinerja .....	10
3. Realisasi Anggaran .....	23
4. Analisis Efisiensi .....	23
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>26</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>27</b>

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perda Nomor 03 Tahun 2016 di atas, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, sebagai berikut:

- (1) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah
- (2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah
- (4) Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah; dan
- (5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani Perjanjian Kinerja tahun 2017 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2017, Sekretariat Daerah Kabupaten

Bengkalis terdapat 4 (empat) sasaran dan terdapat 12 (dua belas) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2017.

Secara umum sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017 Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis telah tercapai, yaitu dari 4 (empat) sasaran dan 12 (dua belas) indikator kinerja dinilai sudah tercapai dan terpenuhi, dengan predikat “**sangat berhasil**” dengan rata – rata nilai capaian kinerja sebesar **142,89%** serta tingkat efisiensi anggaran sebesar **7,52%**.

Dari 12 (dua belas) indikator kinerja tahun 2017, target indikator kinerja yang belum tercapai adalah sebanyak 4 (empat) indikator, yaitu 3 (tiga) indikator pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan 1 (satu) indikator pada sasaran meningkatnya daya saing SDM. Meskipun beberapa Indikator Kinerja tersebut belum mencapai target kinerja, namun rata – rata nilai capaiannya berpredikat “**berhasil**”.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, serta bimbingan dan dukungan dari pimpinan. Untuk tahun 2018, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Daerah.

### **1.2. Maksud dan Tujuan LAKIP**

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun

2017. Adapun tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah ;

- a. Sebagai sarana bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2017 kepada seluruh stakeholders.
- b. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

### **1.3. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perda Nomor 03 Tahun 2016 di atas, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, yaitu meliputi;

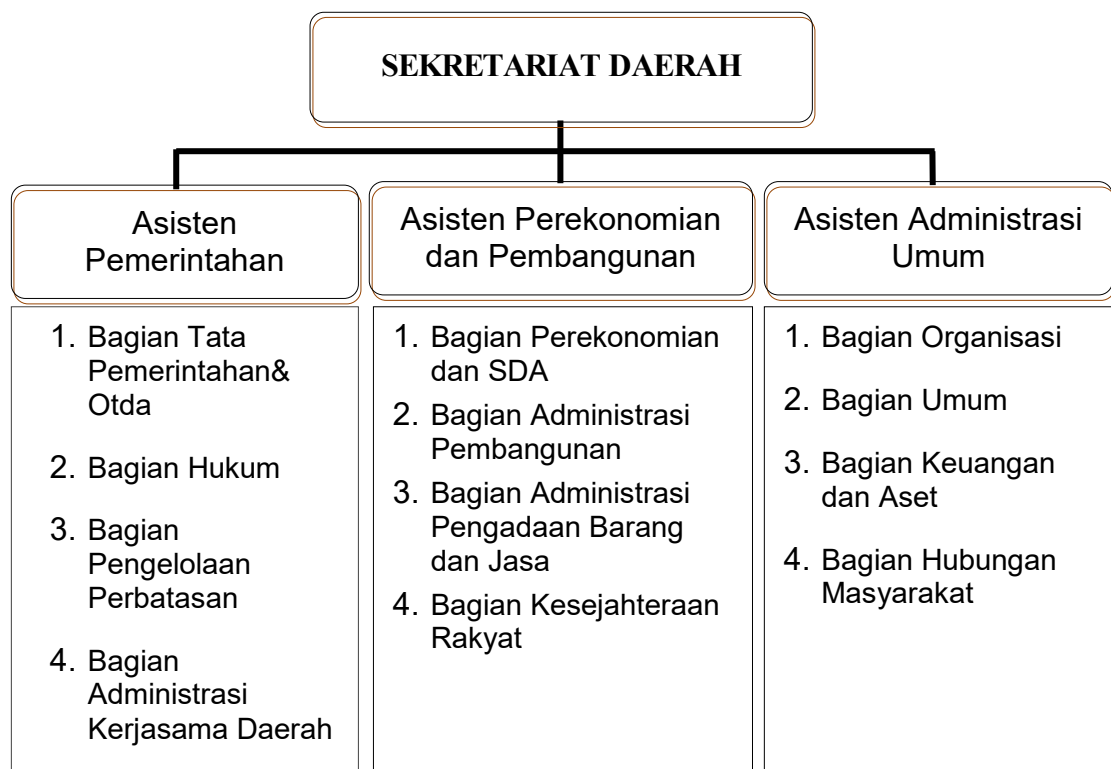
- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya



#### 1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2016 tersebut, Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris Daerah, 3 (tiga) orang Asisten Sekretaris Daerah, 12 (dua belas) Bagian, 36 (tiga puluh enam) Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan susunan organisasi sebagaimana termuat pada Bagan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, sebagai berikut :

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Setda Kabupaten Bengkalis



Sumber: Peraturan Bupati Bengkalis No. 34 Tahun 2016



Plt. Sekretaris Daerah kab.Bengkalis, Bapak H. ARIYANTO saat memimpin rapat



Plt. Sekretaris Daerah(kanan) bersama Bupati Bengkalis (kiri) dan Asisten II (tengah),

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2017 ini disusun untuk menjawab Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017. Penyusunan LAKIP ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 dan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 – 2021 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021.

### **2.1. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Proses awal pengukuran kinerja adalah pengumpulan data kinerja dari setiap target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program serta sasaran yang telah ditetapkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal yang tersaji pada tabel 2.1 di bawah ini.

**Tabel 2.1. Skala Pengukuran Ordinal Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	>95	Sangat Berhasil	
2.	80 s/d 95	Berhasil	
3.	50 s/d 80	Cukup Berhasil	
4.	< 50	Kurang Berhasil	

*Sumber: Permendagri No. 54 Tahun 2010, diolah*

**2.2. Rencana Strategis Tahun 2016 -2021**

No.	Sasaran	Indikator	Target					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.1. Indek Kepuasan Masyarakat	56,50%	61,25%	68,45%	74,75%	78,80%	80%
2.	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	2.1. Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis	CC	B	B	BB	BB	BB
		2.2. Prestasi LPPD	T	T	ST	ST	ST	ST

**2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran		Target
1	2	3		4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.1.	Indek Kepuasan Masyarakat	61,25%
2.	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	2.1.	Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis	B
		2.2.	Prestasi LPPD	T



## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2017. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

### **3.1. Pengukuran Kinerja**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.1.	Indek Kepuasan Masyarakat	61,25%	69,47%	113,42%
2.	Meningkatnya Kinerja Setda Kabupaten Bengkalis	2.1.	Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis	B	<b>B*</b>	100%
		2.2.	Prestasi LPPD	T	<b>T*</b>	100%

*Ket : \* Prediksi*

### **3.2. Analisis Kinerja**

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator yang telah ditetapkan, secara keseluruhannya dinyatakan **“sangat berhasil”** yaitu capaian kinerja rata-rata sebesar **106,71%**, dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar **7,46%**.

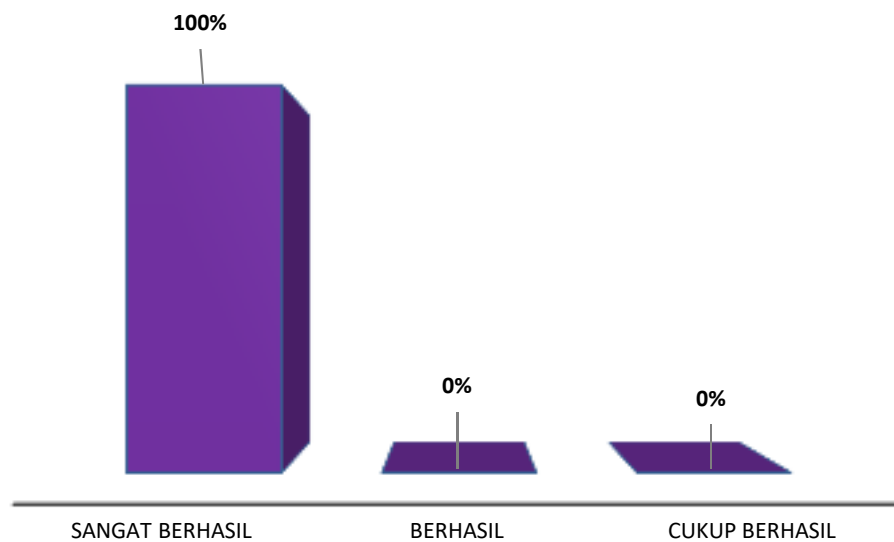
Berdasarkan skala penilaian sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.1 di atas, bahwa nilai capaian kinerja > 95% dikategorikan sangat

berhasil. Sedangkan rata – rata capaian kinerja Setda Kabupaten Bengkalis sebesar 104,47%, sehingga di kategorikan **Sangat Berhasil**.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2017 terhadap 2 (dua) sasaran kinerja, dan terdiri dari 3 (tiga) indikator dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tercapai dengan predikat “**sangat berhasil**”.

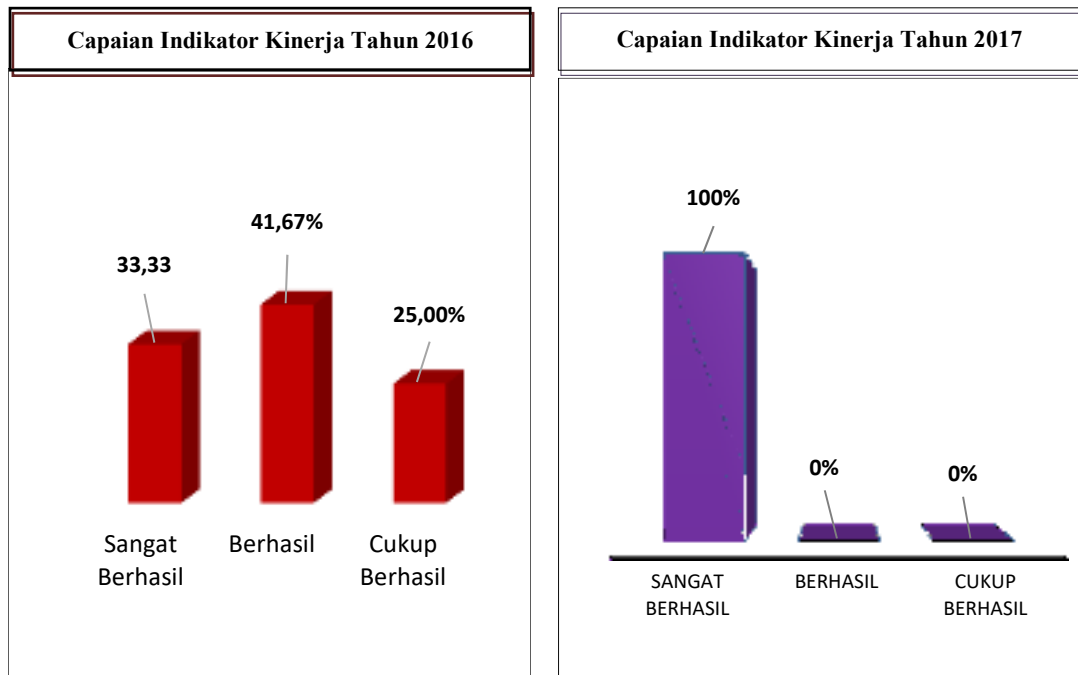
Gambaran capaian 12 (dua belas) indikator kinerja tahun 2017 digambarkan sebagai berikut.

Grafik1. Kondisi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017



Capaian indikator kinerja tahun 2017, jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2016 mengalami kenaikan atau peningkatan yang cukup signifikan. Perbandingan capaian indikator kinerja Tahun 2016 dengan 2017 adalah sebagai berikut.

Grafik 2. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 dan 2017



Adapun uraian analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya, dapat dijelaskan sebagai berikut.

**MISI I Mewujudkan Pemerintahan yang Berwibawa, Transparan dan Bertanggung Jawab serta dapat Melaksanakan Kepimpinan dengan Bijak, Berani dan Ikhlas**

**Sasaran 1 :**

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

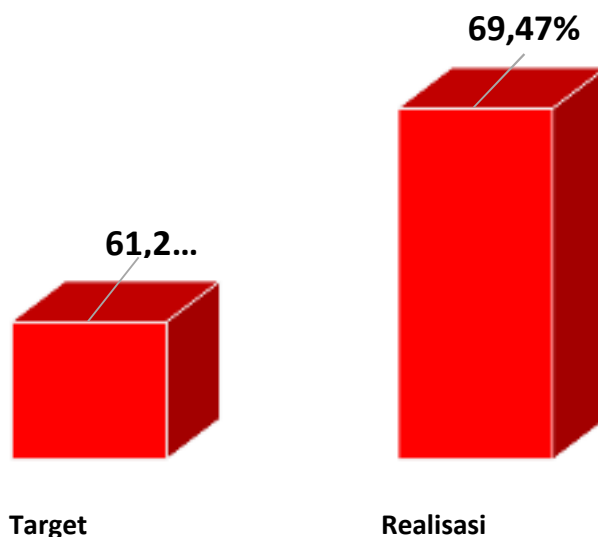
Indikator	2016	2017			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2017 Terhadap 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Indek Kepuasan Masyarakat	56,50%	61,25%	69,47%	113,42%	80%	86,84%
Rata-rata Capaian				113,42%		



Pada tabel di atas terlihat bahwa capaian rata - rata indikator pada tahun 2017 telah melebihi target, yaitu sebesar 113,42%. Meskipun tingkat capaian rata –rata indikator dinilai telah melebihi target yang telah ditetapkan, namun perbaikan secara menyeluruh baik dalam mekanisme perencanaan, penilaian hingga evaluasi terus dilakukan secara intensif, agar nilai akhir ditahun akhir RPJMD dapat lebih baik.

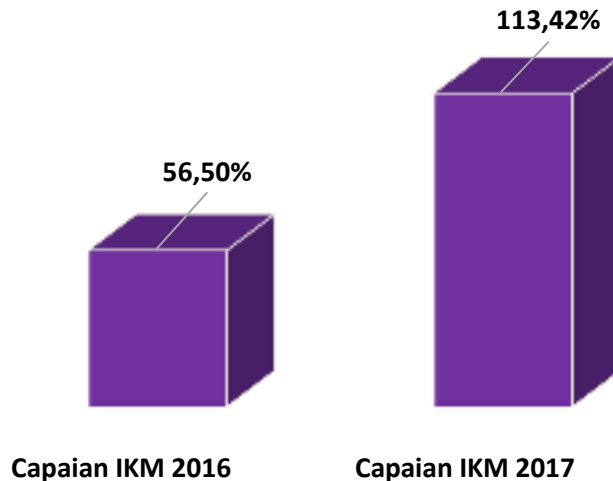
Ilustrasi perbandingan antara target dan realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dapat digambarkan dalam sebuah grafik seperti di bawah ini.

Grafik3: Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2017



Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2017, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 mengalami kenaikan atau peningkatan yang cukup signifikan. Perbandingan capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2016 dengan tahun 2017 dapat di ilustrasikan sebagai berikut.

Grafik 4 : Perbandingan Capaian Indikator IKM Tahun 2016 dengan 2017



Dalam grafik 4 di atas menunjukkan bahwa capaian indikator IKM tahun 2017 meningkat secara signifikan dibandingkan dengan capaian IKM tahun 2016. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan kinerja Setda Kabupaten Bengkalis.

#### **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

Keberhasilan sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah;

- (1) Adanya prosedur dan pembagian tugas/kerja yang jelas, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Bengkalis No. 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Dalam Peraturan Bupati tersebut dengan rinci menjelaskan uraian tugas masing - masing bagian dan sub bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.
- (2) Adanya komitmen, disiplin dan respon yang baik dari Pimpinan dan Staf dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
- (3) Terpenuhinya kebutuhan dasar yang memadai dalam melaksanakan tugas pelayanan, seperti; SOP/KAK/TOR, peraturan perundang – undangan dan lain – lain

- (4) Adanya komunikasi yang efektif antar bagian, sub bagian, pengguna layanandan *Stakeholder* terkait.

**Permasalahan/Hambatan**

- (1) Terbatasnya data dan informasi yang akurat
- (2) Sumberdaya ASN yang ada belum memadai
- (3) Jaringan internet yang belum memadai;

**Solusi/strategi pemecahanmasalah**

- (1) Memulai menyusun data base terkait IKM, prasarana,sarana, potensi wilayah kecamatan/kelurahan/desa
- (2) Meningkatkan kapasitas sumberdaya ASN
- (3) Menambah kapasitas jaringan internet dan menambah Wi – Fi pada setiap bagian

**Sasaran 2 :**

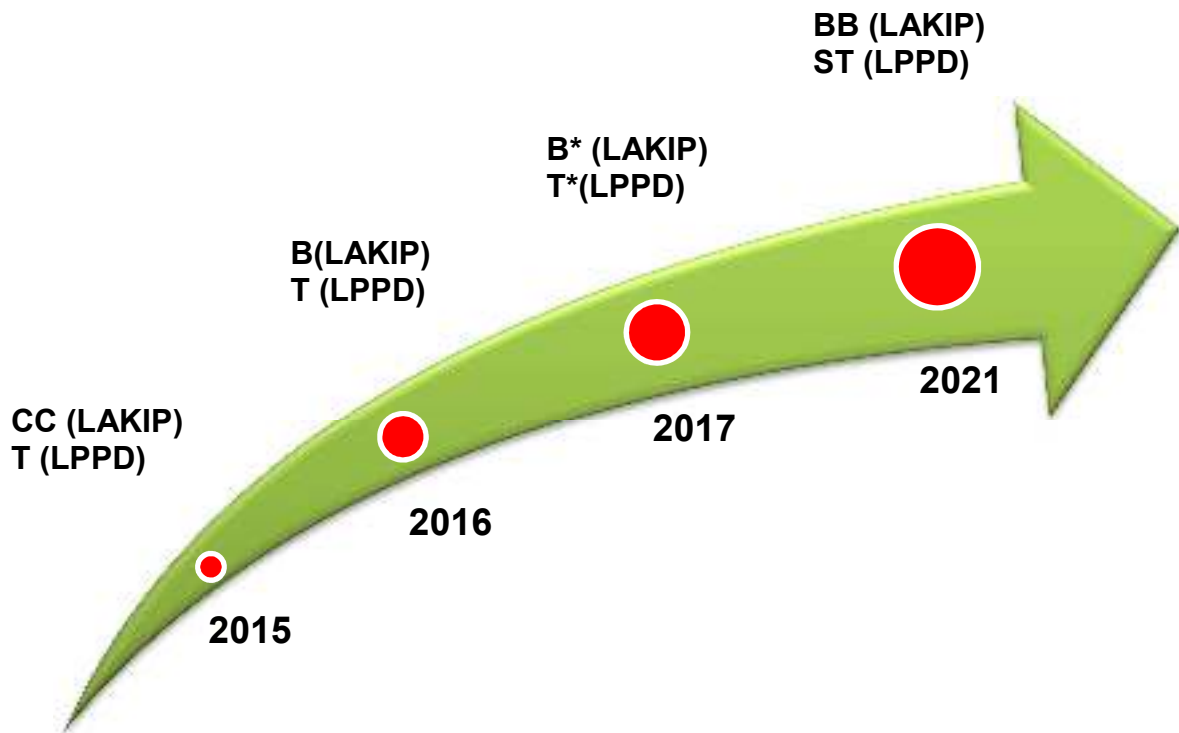
**Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah**

Indikator	2016	2017			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2017 Terhadap 2021 (%)
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Nilai Akuntabilitas Kinerja Setda Kab. Bengkalis	CC	B	<b>B*</b>	100%	BB	80,00%
Prestasi LPPD	T	T	<b>T*</b>	100%	ST	80,00%
Rata-rata Capaian				100%		

*Ket : \*) Angka Prediksi,dalam proses analisis*

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2017 capaian yang telah diproyeksikan untuk nilai LAKIP adalah **B\*** (baik) dan nilai prestasi LPPD adalah **T\***(tinggi). Nilai ini telah mencapai target dari yang ditetapkan pada tahun 2017 dan telah mencapai target capaian akhir RPJMD tahun 2021.

Meskipun tingkat capaian rata –rata indikator kinerja telah mencapai target dari yang ditetapkan pada tahun 2017, namun, perbaikan secara menyeluruh baik dalam mekanisme perencanaan, penilaian hingga evaluasi terus dilakukan secara intensif, agar nilai akhir ditahun akhir RPJMD dapat lebih baik.



**Gambar 2: Capaian Indikator LAKIP dan LPPD**

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah;

- (1) RENSTRA, Dokumen perencanaan, Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis semakin baik.
- (2) IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis sudah terukur serta capaiannya mampu melebihi target yang ditetapkan.

- (3) Tersedianya kebutuhan dasar yang memadai dalam melaksanakan tugas pelayanan, seperti; ruangan kerja, komputer, alat transportasi, KAK, peraturan perundang – undangan dan lain – lain
- (4) Adanya prosedur dan pembagian tugas/kerja yang jelas, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Bengkalis No. 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Dalam Peraturan Bupati tersebut dengan rinci menjelaskan uraian tugas masing - masing bagian dan sub bagian di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Bengkalis.
- (5) Adanya komitmen, disiplin dan respon yang baik, baik dari pimpinan maupun staf dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
- (6) Adanya komunikasi yang efektif antar bagian dan sub bagian.

**Permasalahan/Hambatan**

- (1) Terbatasnya data dan informasi yang akurat
- (2) Sumberdaya ASN yang ada belum memadai
- (3) Jaringan internet yang belum memadai

**Solusi/strategi pemecahanmasalah**

- (1) Memulai menyusun data base terkait kinerja pemerintah daerah
- (2) Meningkatkan kapasitas sumberdaya ASN
- (3) Menambah kapasitas jaringan internet dan menambah Wi – Fi pada setiap bagian

**3.3. Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 yang dimanfaatkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, adalah sebesar Rp.90.167.859.333,00 atau 92,54% dari pagu anggaran sebesar Rp.97.435.686.616,00.

Penyerapan anggaran terbesar terdapat pada **sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik**, yaitu sebesar Rp.87.536.119.224,00 (93,19%). Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada **sasaran meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah** yaitu sebesar Rp. 2.631.740.109,00 (75,17%). Selanjutnya, terkait dengan realisasi anggaran setiap program secara rincian sebagaimana terlampir.

Rincian capaian kinerja dan anggaran di tahun 2017 setiap sasaran sebagai berikut:

No.	Sasaran	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	Anggaran		
			Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	113,42	93.934.645.269	87.536.119.224	93,19
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	100,00	3.501.041.347	2.631.740.109	75,17
	Jumlah	106,71	97.435.686.616	90.167.859.333	92,54

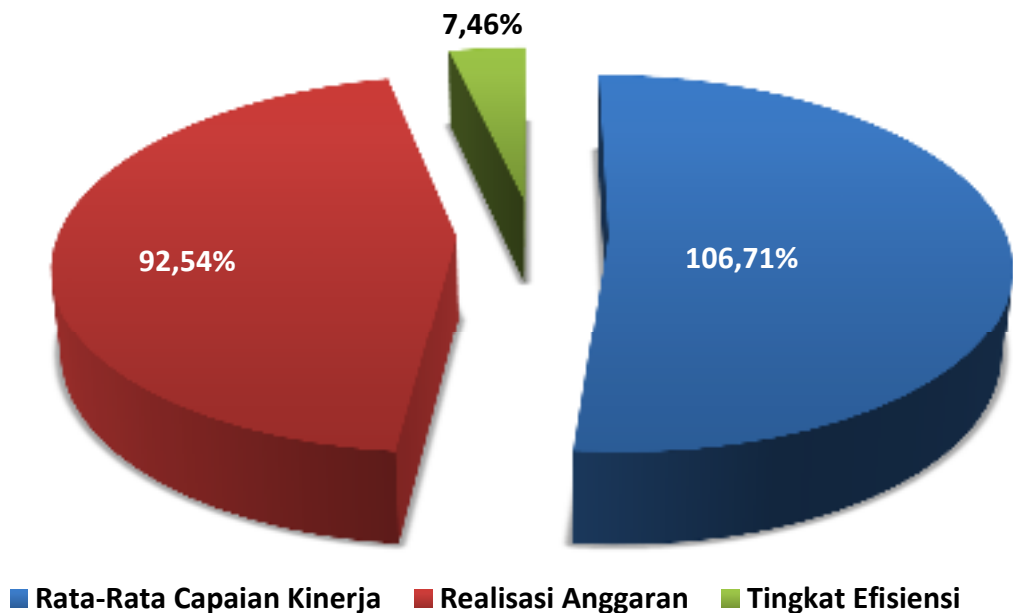
### 3.4. Analisis Efisiensi

No.	Sasaran	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	113,42	93,19	6,81
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	100,00	75,17	24,83
	Jumlah	106,71	92,54	7,46

Berdasarkan tabel efisiensi tersebut di atas dapat diketahui bahwa perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2017 secara

umummenunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang tinggi, yaitu sebesar 7,46%. Hal ini bisa dilihat dari lebih besarnya capaian kinerja jika dibandingkan dengan penyerapan anggarannya. Ini berarti bahwa pencapaian kinerja dari sisi pelaksanaan program telah dicapai dengan cara yang sangat efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dan juga lebih kecil dari realisasi capaian kinerja.

Gambar 3: Perbandingan Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja dengan realisasi penyerapan anggaran dan Tingkat Efisiensi pada tahun 2017



## PENUTUP

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah tahun 2017 telah dicapai dengan predikat “**sangat berhasil**”, yaitu dari 2 (dua) sasaran yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja seluruhnya dinilai “**sangat berhasil**”, dengan nilai rata – rata capaian kinerjanya sebesar 106,71%.

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata- rata capaian kinerja sasaran, dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) sasaran kinerja seluruhnya telah menggunakan sumber daya dengan sangat efisien.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2017 telah dicapai dengan predikat “**sangat berhasil**”, dengan nilai rata – rata capaian kinerjanya sebesar 106,71%.

Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, antara lain; karena adanya komitmen serta dukungan dari pimpinan dan jajaran staf Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Namun demikian, untuk tahun 2018, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.

Beberapa langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan kinerja tahun 2018, antara lain sebagai berikut ;

- (1) Review Renstra Setda Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021.



- (2) Realisasi atas Perjanjian Kinerja maupun Indikator Kinerja Utama tahun yang lalu, dijadikan salah satu pertimbangan bagi Tim Anggaran untuk memberikan anggaran pada bagian terkait.
- (3) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran.
- (4) Hasil evaluasi LAKIP dapat dimanfaatkan untuk memberikan *reward and punishment*.